

# DINAMIKA DAN PERILAKU POLITIK KEPARTAIAN DI INDONESIA

**Edward Kocu\***

\*Dosen Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNCEN  
Alamat : Jln. SPG Kampwolker, Waena – Jayapura.

**Abstrak :** *Artikel ini merupakan Bahan diskusi pada Focus Group Discussion “PEMBAHARUAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA. Bekerjasama PUSAKO Universitas Andalas Padang dan CEPP Universitas Cenderawasih Papua pada tanggal 30 Mei 2016 di Swiss-Bell Hotel Jayapura. Pembahasan dalam artikel ini menitikberatkan pada dinamika dan perilaku politik kepartaian di Indonesia. Artikel ini menggunakan bahan studi literatur dan analisis wacana tentang dinamika kepartaian di Indonesia berdasarkan fase fase penyederhanaan yang dikemas dalam tiga fase. Dalam pembahasan terungkap bahwa manuver politik yang dilakukan partai politik pada tiap fase adalah terjadinya perubahan posisi partai, dari patron terhadap pemerintah menjadi klien pemerintah. Bukannya partai menentukan komposisi aparat pemerintah, namun aparat pemerintah yang menentukan komposisi (pengurus) partai. Konsekuensi logis dari perubahan ini adalah terjadinya perubahan pada sistem kepartaian yang berlaku*

**Kata Kunci :** *Dinamika Politik, Perilaku Kepartaian, Indonesia*

**Abstract:** *This article is a discussion at Forum Group Discussion about the reformation of political parties in Indonesia. The discussion work together between PUSAKO (Pusat Studi Konstitusi), Constitutional Studies Centre of Andalas University, Padang with CEPP (Center for Election and Political Party) of Cenderawasih University at 30 May 2016 in Swiss-Bell Hotel Jayapura. This article concern about the dynamics and behaviour of parties politic in Indonesia. This study use literature study and discourse analysis about the dynamic parties in Indonesia based on simply phase into three phase. In this discussion show that political manuver by political parties for every phase becomes change into the position party from the patron of the government party into government clients. It means that the party did not ensure the composition of government apparatus but government apparatus ensure the organization of party. The logical consequence of this change is a change in the prevailing party system.*

**Key Words :** *Political dynamic, Party behaviour, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Diantara fenomena yang ada dimuka bumi ini, peristiwa politik merupakan fenomena yang paling menarik untuk diperhatikan dan diulas oleh kalangan pers. Selain berlangsung hampir tiap saat, tidak pernah habis digali, fenomena politik tampaknya dapat diulas dari sudut pandang apa saja. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari makin tipisnya garis pemisah antara fenomena politik dan fenomena sosial lainnya.

Kaburnya demokrasi inilah yang sering menggiring orang ke persoalan bagaimana seharusnya fenomena politik diterjemahkan. Apakah tindakan seseorang dapat benar-benar bebas dari pengaruh struktur sosial, situasi yang berkembang, dan

norma-norma yang melingkupinya? Atau sebaliknya, tingkah laku individu merupakan refleksi dari struktur dan norma yang berlaku?

Rangkaian pertanyaan diatas merupakan persoalan-persoalan yang sangat sulit dijawab dalam konteks pengaruh. Maksudnya kita secara tegas, kaku (*rigid*), menyatakan bahwa struktur berpengaruh terhadap tingkah laku individu tanpa membuka peluang bagi pengaruh individu terhadap struktur. Sejauh ini kita hanya dapat menempatkan dua fenomena dalam konteks saling berhubungan. Kalaupun kita berhasil menetapkan hukum pengaruh diantara keduanya, maka hal itu hanya berlaku sesaat, tidak bisa digeneralisasikan.<sup>1</sup>

Apakah "kelemahan" ini menurunkan derajat penjelasan kita terhadap fenomena yang diulas? Tidak. Keadaan ini justru menjadi "kekuatan" sebab kita bisa menjelaskan sebuah fenomena dari berbagai aspek. Tugas kita adalah menentukan dimensi yang menarik untuk dibahas, memilih pintu masuk (*entry point*), lalu secara konsisten mengikuti alur logika yang tersedia. Selama kesimpulan yang diambil tidak keluar dari alur yang ada, dan secara konsisten mengambil kesimpulan sesuai dengan *unit of analysis* yang digunakan, maka keabsahan uraian kita bisa dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup>

Dalam menganalisa fenomenon politik, kadang kala kita harus bermain diantara dua pendekatan dan dua tingkatan analisa. Faktor ini menambah sulit tugas-tugas wartawan. Selain dituntut untuk dapat secara tajam menangkap inti masalahnya, setiap saat kita dituntut untuk dapat membangun satu sintesa penjelasan. Padahal ruang dan waktu yang tersedia selalu sangat terbatas. Dengan adanya tulisan ini penulis berupaya menganalisa dalam rangka mengatasi kendala – kendala sebagaimana uraian dasar permasalahan dengan mengambil tema "Pembaharuan Partai Politik" sebagai obyek bahasannya.

## PEMBAHASAN

### Partai dan Tujuan Pembentukannya

Untuk dapat menggambarkan dinamika perilaku partai politik di Indonesia, terlebih dahulu harus kita sepakati pengertian tentang partai politik, fungsi utamanya, dan latar belakang atau sejarah perjalanan partai politik di Indonesia selama ini.

Dalam literatur ilmu politik setidaknya dikenal 80 definisi mengenai partai politik. Namun terlepas dari variasi yang ada, para pakar sepakat bahwa partai memiliki beberapa ciri-ciri. *Pertama*, Partai Politik merupakan kumpulan orang-orang yang se-ide dan berupaya mewujudkan ide-ide mereka dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, Partai Politik memiliki organisasi yang rapi, yang menjamin kontinuitas kegiatan sepanjang tahun. *Ketiga*, Partai Politik selalu berupaya menyusun agenda kebijakan publik, serta berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan atas agenda tersebut. Dan ciri *keempat* adalah, Partai Politik selalu 'berambisi' menempatkan wakil-wakilnya dalam jajaran pemerintahan.

Ciri pertama, kumpulan orang se-ide, menunjukkan bahwa ide dari orang-orang yang berkumpul pada satu partai berbeda dari ide orang dikumpulan yang lain. Perdebatan sering muncul, apakah ide yang dimaksudkan disini adalah perbedaan ideologi dalam pengertian prinsip-prinsip dasar bernegara, atautkah perbedaan cara

<sup>1</sup>Samuel M. Hines, Jr., "Is Synthesis Philosophically Possible? The Paradigm Problem in the Philosophy of Social Science," in William T. Bluhm (ed.), *The Paradigm Problem in Political Science*, (Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 1982) p. 26-27.

<sup>2</sup>William T. Bluhm, "Syntheazing Rational and Cultural Models: An Empirical Survey and a Theoretical Suggestion," *Ibid.*, p. 114.

mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya bergerak pada tataran abstrak. Pada awalnya orang percaya bahwa ide disini bermakna perbedaan pada prinsip-prinsip dasar. Namun pemahaman itu berlaku pada bangsa yang masih muda, dimana mereka sedang berjuang untuk mengintegrasikan suku-suku bangsa yang ada. Ketika integrasi nasional tercapai, maka ide lebih banyak diartikan sebagai cara perwujudan cita-cita bersama.<sup>3</sup>

Ciri kedua, organisasi yang rapi, menunjukkan adanya prosedur tertentu yang disepakati bersama untuk menghidupkan aktivitas partai. Termasuk didalamnya adalah cara menseleksi kandidat yang layak ditampilkan, cara menangani isu yang ada dalam masyarakat, dan cara memelihara dukungan massa agar "suara partai" tetap diperhitungkan oleh partai-partai lain. Adanya ciri-ciri inilah yang membedakan sebuah partai politik dengan organisasi politik lain seperti kelompok kepentingan (*interest group*) ataupun kelompok penekan (*pressure group*).<sup>4</sup>

Ciri ketiga, susunan agenda kebijakan publik. Berbeda dari bentuk kelompok politik yang lain, partai memiliki semacam kerangka berfikir yang dipakai oleh setiap aktivisnya untuk menerjemahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Kerangka berfikir ini menjadi ciri yang membedakan satu partai dengan partai yang lain. Hingga sebenarnya agenda pembicaraan publik itu penuh dijejali oleh persepsi partai politik yang ada. Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada inilah kemudian anggota masyarakat memutuskan siapa diantara partai yang ada, yang menawarkan pemecahan paling logis terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Keempat, tempatkan wakil dalam jajaran pemerintahan. Agar supaya idealisme partai terwujud, melalui pemilihan umum partai harus mampu menempatkan wakil-wakil mereka kedalam jaringan pemerintahan. Keberadaan wakil partai dalam jaringan itu adalah untuk menjamin bahwa visi partai terhadap satu masalah mempengaruhi isi atau jiwa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, atau setidaknya menjadi pertimbangan sebelum keputusan akhir ditentukan. Catatan yang harus dikemukakan disini adalah, dalam khasanah Ilmu Pemerintahan, arti kata pemerintahan dibedakan kedalam pengertian yang sempit dan yang luas. Pengertian yang sempit menunjuk kepada bidang tugas *eksekutif*. Sedangkan pengertian yang luas menunjuk kepada bidang *eksekutif, legislatif, dan yudikatif*.<sup>6</sup>

Atas dasar keempat ciri inilah maka dalam tulisan ini yang dimaksud dengan partai politik adalah: *Any group identified by an official label that presents at elections, and is capable of placing through elections (free or non-free), candidate for public office*.<sup>7</sup> Ada dua keuntungan yang didapat dengan menggunakan definisi ini. *Pertama*, Sartori tidak mempersoalkan ideologi tetapi label, merek. Definisi ini menghindarkan kita dari perdebatan mengenai makna ideologi itu sendiri yang penggunaannya pada negara sedang berkembang sering dikaburkan dengan norma dasar berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup> Definisi ini, dengan demikian, memberi landasan konseptual bagi

<sup>3</sup>Angelo Panebianco, *Political Parties: Organization and Power*, (Cambridge, NY.: Cambridge University Press, 1988) pp. 18-19.

<sup>4</sup>Francis G. Castles, *Pressure Groups and Political Culture*, (London, UK.: Routledge and Kegan Paul, 1967).

<sup>5</sup>Irving Crespi, *Public Opinion, Polls, and Democracy*, (Boulder, CO.: Westview Press, 1988) p. 10.

<sup>6</sup>Mariun, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, diktat kuliah, 1979).

<sup>7</sup>Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, (Cambridge, NY.: Cambridge University Press, 1976) p. 63.

<sup>8</sup>Arti kata ideologi sebenarnya adalah ilmu tentang ide. Ia berhubungan dengan satu set nilai dan kepercayaan yang dimiliki sekelompok orang, yang digunakan sebagai basis untuk menerjemahkan realitas sosial. Bisa terjadi variasi terjemahan, tetapi tidak secara substansial merubah nilai-nilai dasar yang ada.

pembenaran diterapkannya ideologi tunggal Pancasila dalam perpolitikan di Indonesia. *Kedua*, definisi ini tidak terlalu mementingkan persyaratan pelaksanaan pemilihan umum, serta ciri kelompok yang berkompetisi didalamnya. Pokoknya ada sekelompok orang yang se-ide, ikut pemilihan umum, dan mampu menempatkan wakil-wakilnya pada posisi jabatan publik. Melalui definisi ini Sartori dengan jeli sanggup menjangkau kelompok politik yang enggan menyebut dirinya partai, tetapi melaksanakan sepenuhnya fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan sebuah partai.<sup>9</sup>

Fungsi utama partai politik ada empat.<sup>10</sup> *Pertama*, menjalankan seluruh fungsi input yang ada dalam sistem politik, yakni: sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, dan rekrutmen politik. Melalui partai nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dikenalkan kepada anggota masyarakat. Setelah masyarakat mengenal nilai-nilai dasar kehidupan politik, mereka faham akan hak dan kewajibannya, menjadi tugas partai untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat. Setelah itu, partai menjual ide-ide yang mereka bangun atas dasar aspirasi masyarakat yang terjaring melalui komunikasi politik, dengan tujuan agar ide-ide itu lebih berpeluang masuk dalam agenda kebijakan publik.<sup>11</sup> Untuk menjamin bahwa ide-ide itu benar-benar akan diperjuangkan secara maksimal, maka partai akan menunjuk wakilnya melalui satu proses rekrutmen politik.<sup>12</sup>

Fungsi Partai Politik *Kedua*, adalah sebagai sarana pengendalian konflik. Dari literatur mengenai partai politik terlihat bahwa kemunculan partai politik disatu masyarakat tidak terlepas dari dua hal, yakni dianutnya prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis, serta terjadinya modernisasi. Modernisasi mendorong berkembangnya aspirasi dalam satu masyarakat, yang pada giliran selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya *fragmentasi* sosial yang makin luas. Pada awalnya orang percaya bahwa masyarakat yang semakin ter*fragmentasi* membutuhkan partai politik yang banyak. Hingga diawal tahun 1960-an para ilmuwan percaya pada hukum *linear* bahwa semakin moderen satu masyarakat maka akan ditemui semakin banyak partai. Pandangan ini dipatahkan pada tahun 1970-an. Dalam masyarakat muncul --yang disebut Emile Durkheim-- sebagai *collective mind* dan *collective consciousness*. Pemikiran bersama dan kesadaran bersama. Dua hal inilah yang menghentikan hukum *linear* tersebut. Lambat laun masyarakat akan sadar bahwa *esensi* politik adalah ada

---

Sumber bacaan yang bisa digunakan untuk pembahasan lebih mendalam adalah Robert E. Lane, *Political Ideology: Why the American Common Man Believes What He Does*, (New York, NY.: Free Press, 1962); Roy C. Macridis, *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes*, (Boston, MA.: Little Brown, 2nd. edition, 1983); dan Everett Carl Ladd, Jr., *Ideology in America: Change and Response in a City, a Suburb, and a Small Town*, (Lanham, MD.: University Press of America, 1986).

<sup>9</sup>Dalam banyak negara berkembang, terutama mereka yang sedang bergulat dengan upaya menegakkan integrasi nasional, pergolakan politik selalu diidentikan dengan kehadiran partai-partai "diluar batas yang diperlukan." Partai identik dengan kekacauan, sehingga banyak rejim politik yang menghindari penggunaan terminologi partai politik bagi mesin politik yang mereka gunakan, dengan maksud memberi kesan kepada masyarakat bahwa kelompok mereka bukanlah bagian dari kejahatan politik yang pernah berlangsung. Pembahasan mengenai hal ini bisa disimak dalam Riswandha Imawan, *The Evolution of Political Party Systems in Indonesia*, (DeKalb, Il.: Northern Illinois University, a dissertation, 1989) p. 14-16.

<sup>10</sup>Disarikan dari pendapat Sartori, *Ibid.*; Leon D. Epstein, *Political Parties in Western Democracies*, (New Jersey: Transaction Books, 1982) pp. 77-80; Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977) hal. 163-164.

<sup>11</sup>Dalam tradisi Eastonian, masuk atau tidak masuknya tuntutan, kepentingan, ataupun aspirasi masyarakat kedalam *conversion box* dalam sistem politik, sangat tergantung kepada dukungan yang ada. Melalui komunikasi politik, partai berusaha memperluas segmen sekaligus kuantitas pendukung sehingga kesempatan ide-ide mereka untuk menjadi agenda publik semakin besar.

<sup>12</sup>Rekrutmen politik adalah proses seleksi terhadap warga negara yang dipandang cakap atau memadai untuk diberi hak mengambil keputusan atas nama kepentingan rakyat.

yang memerintah dan ada yang diperintah. Sehingga partai politik juga akan terpolakan ke dalam partai yang sedang memerintah dan partai tidak memerintah. Sejak akhir 1970-an orang justru percaya bahwa dalam masyarakat yang sangat modern itulah yang akan muncul gejala penyederhanaan secara alamiah, yang akan berakhir ke bentuk sistem dua partai.<sup>13</sup>

Fungsi pengendalian konflik disini berhubungan dengan upaya menyederhanakan kompleksitas hubungan yang muncul sebagai akibat dari berkembangnya jumlah partai yang ada. Mari kita renungkan. Kalau prinsip demokrasi benar-benar dilaksanakan secara murni, maka masing-masing orang akan menjadi partai untuk dirinya sendiri. Bila ada 190 juta orang Indonesia, maka sebanyak itu pulalah jumlah partai dinegara kita. Bayangkan saja ada berapa ratus juta jaringan yang terbentuk. Adalah tugas partai untuk menyederhanakan konflik yang muncul agar dapat di-*manage* oleh mekanisme sistem politik.

Fungsi partai politik *Ketiga* adalah menyusun agenda kebijakan publik. Fungsi ini merupakan konsekuensi logis dari peran partai sebagai artikulator aspirasi masyarakat. Partai harus mampu mengolah dan menempatkan aspirasi masyarakat ke dalam agenda kebijakan publik, sebab seluruh keputusan politik yang akan diambil akan bersandar kepada agenda yang terbentuk.

Sedangkan fungsi partai politik *Keempat* adalah membentuk pemerintahan. Beberapa pakar bahkan menyebut kemampuan partai membentuk pemerintahan sebagai fungsi yang paling penting. Alasannya karena partai politik merupakan produk dari gelombang demokrasi, maka satu pemerintahan yang demokratis sewajarnya merupakan hasil dari kompetisi antar partai yang ada. Hanya masalahnya, apakah kompetisi itu dalam konteks *zero-sum game* yang mengenal prinsip *the winner takes all*? Ataukah kompetisi sebatas menentukan porsi komposisi wakil partai dalam pemerintahan? Jawabnya sangat tergantung kepada sistem kepartaian yang berlaku.

### **Sistem Kepartaian**

Dalam tulisan ini, sistem kepartaian diartikan sebagai interaksi antar partai-partai yang ada dalam upaya menyusun dan memutuskan agenda kebijakan publik. Penggunaan kata interaksi menunjukkan adanya hukum aksi-reaksi. Maksudnya bila satu partai melakukan aksi, maka partai lain akan memberikan reaksi. Pengertian ini juga mengandung makna bahwa keberadaan satu partai sangat ditentukan oleh keberadaan partai lain. Konsekuensinya, bila kita menghendaki satu sistem kepartaian yang sehat, yang tangguh, maka partai-partai yang ada harus memiliki kemampuan yang sepadan disertai dengan adanya kompetisi yang terbuka dan adil. Ketimpangan kemampuan antar partai yang ada, dengan sendirinya akan membuat sistem yang berlaku berjalan pincang. Bahkan tidak tertutup kemungkinan *superioritas* satu partai larut ke dalam *inferioritas* partai lain. Akibatnya tujuan yang hendak dicapai tidak tercapai secara maksimal.

Setidaknya ada dua faktor yang menentukan kinerja sebuah sistem kepartaian. *Pertama*, jumlah partai yang ada. Faktor ini jelas sangat menentukan kompleksitas interaksi ataupun kompleksitas konflik yang ada dalam satu masyarakat. Berapa banyak partai yang dibutuhkan dalam satu masyarakat, tidak ada dalilnya. Hanya saja jumlah partai yang sangat banyak dapat menghasilkan situasi yang sama buruknya dengan jumlah partai yang sangat sedikit. Bila jumlahnya terlalu banyak, bisa jadi isu-isu yang kurang penting atau kurang relevan dibicarakan pada tingkat negara masuk

---

<sup>13</sup>Epstein, *Op.cit.*, pp. 70, 348-349.

kedalam mekanisme politik yang berlangsung.<sup>14</sup> Sebaliknya bila jumlahnya terlalu sedikit (bila dibandingkan dengan pluralitas masyarakatnya) maka boleh jadi akan terjadi simplifikasi terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang.

*Kedua, independensi* partai-partai yang ada. *Independensi* disini menunjuk kepada keleluasaan partai politik menentukan *platform* politik mereka sendiri, dalam arti bebas dari campur tangan pihak-pihak luar partai termasuk pemerintah, sanggup membiayai kegiatan rutin organisasi, dan kesanggupan memunculkan kandidat tanpa adanya campur tangan pihak luar. Untuk bisa memainkan secara maksimal fungsinya seperti yang disebut diatas, partai politik harus benar-benar bebas dari pengaruh pihak manapun juga. Ketergantungan kepada satu pihak luar saja, sudah dapat merubah fungsi partai dari *artikulator* dan *agregator* kepentingan masyarakat menjadi alat mobilisasi massa.

Dalam buku-buku bacaan banyak ditemui varian sistem kepartaian yang (pernah) ada didunia. Misalnya sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai.<sup>15</sup> Varian seperti ini seakan-akan menempatkan sebuah masyarakat kepada pilihan yang saling meniadakan. Maksudnya, bila memilih sistem partai tunggal, maka selamanya akan menggunakan sistem yang sama. Pandangan seperti ini jelas tidak sesuai dengan asumsi bahwa partai terbentuk karena adanya dorongan modernisasi dan dianutnya prinsip demokrasi pada satu masyarakat. Kedua faktor ini tidak bisa dipandang statis. Karena itu memandang *dipologi* sistem kepartaian sebagai *fenomenon statis* merupakan satu kekeliruan.

Sistem kepartaian dapat (bahkan mungkin harus) dipandang sebagai konsep *linear*. Sistem kepartaian bergerak dari satu titik ke titik berikutnya, sesuai dengan tahapan-tahapan modernisasi yang dicapai satu masyarakat, serta kesadaran anggota masyarakat terhadap hak-hak politiknya.

Atas dasar faktor-faktor diatas, Sartori mengenalkan tujuh varian sistem kepartaian yang menurutnya berlaku di hampir tiap masyarakat politik modern didunia. Ketujuh varian itu adalah: *atomized pluralism*, *polarized pluralism*, *moderate pluralism*, *two party*, *predominant party*, *hegemonic party*, dan *single party*.

Pada awal terbentuknya masyarakat, kesadaran akan hidup dan kepentingan bersama masih sangat rendah. Modernisasi baru menyentuh segelintir orang dalam masyarakat, yang kemudian mengambil inisiatif membentuk partai politik. Partai-partai ini independen, tetapi kehidupannya sangat tergantung kepada kehidupan pimpinan partai sendiri. Itulah sebabnya sistem yang muncul pada periode ini disebut *atomized pluralism*.

Sejalan dengan makin sadarnya anggota masyarakat akan nilai-nilai hidup bersama, muncul kehendak untuk mulai menyatukan berbagai macam kepentingan sejenis. Atas prakarsa mereka sendiri, karena itu disebut secara natural, anggota masyarakat mulai mengelompokkan diri kepada organisasi yang lebih besar. Mulailah muncul *polarized pluralism*. Namun sejalan dengan terjadinya pengelompokan ke organisasi yang lebih besar, polarisasi ideologi antar partai-partai yang ada semakin melebar dan menajam.

Ketika modernisasi makin mengedepan disertai penajaman perbedaan ideologi antar partai, muncul *moderate pluralism*. Dalam sistem ini, sekalipun terdapat banyak partai, namun yang benar-benar efektif mengendalikan roda pemerintahan hanya

---

<sup>14</sup>Parameter yang paling cocok untuk menentukan apakah satu isu itu penting atau tidak penting adalah, apakah substansi dari isu itu menyangkut hidup orang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud orang banyak tidak sekedar menunjuk kepada jumlah, juga kepada variasi segmen masyarakat yang kepentingannya terkait dengan isu tersebut.

<sup>15</sup>Budiardjo, *Op.cit.*, hal. 166-169.

berkisar 5 partai. Selain itu, karena sadar bahwa partai-partai yang ada memiliki kekuatan (massa) yang seimbang, maka sistem ini diwarnai dengan terbentuknya pemerintahan koalisi.

Bentuk pemerintahan koalisi dirasa tidak memuaskan. Setidaknya sering menjadi penghambat bagi upaya memaksimalkan program-program modernisasi yang dicanangkan. Muncul ide dalam masyarakat untuk membentuk *predominant party*. Dalam sistem ini kompetisi antar partai masih terbuka, namun mulai tampak adanya dominasi satu partai terhadap partai yang lain. Dominasi itu diwujudkan kedalam bentuk mengontrol sepak terjang partai lain, termasuk kandidat yang hendak dimunculkan dalam satu pemilihan umum.

Bila langkah diatas sudah diambil, maka kemunculan *hegemonic party* hanya tinggal tunggu waktu saja. Dalam sistem ini, partai-partai lain secara juridis formal diakui keberadaannya, namun pada praktik politik peran mereka ditekan seminimal mungkin. Biasanya sebatas memobilisir massa untuk pencapaian tujuan partai yang berkuasa. Dalam sistem ini, agenda kebijakan publik sepenuhnya berada ditangan satu partai. Satu partai yang dominan berada di lokus kekuasaan, sementara partai-partai lain berada dipinggiran arena politik.

Secara teoritis, setelah *hegemonic party* muncul, maka kemunculan *one party system* sulit dihindari. Dalam sistem ini terjadi monopoli total terhadap seluruh kehidupan politik. Perkembangan kearah ini sebenarnya tidak konsisten dengan logika modernisasi itu sendiri. Modernisasi identik dengan banyak pilihan. Padahal pendorong bagi berubah-ubahnya sistem kepartaian adalah modernisasi.

Seperti telah banyak dibuktikan, tidak ada sebuah negara yang benar-benar maju yang menganut sistem partai tunggal. Kalaupun hal itu hendak dipaksakan, seperti dijamin Uni Soviet, maka sistem itu akan runtuh dengan sendirinya. Karena itu Sartori percaya bahwa ada mekanisme dalam masyarakat yang menarik kecenderungan itu kembali kebelakang, kearah terbentuknya *two party system*. Bahkan menurut beberapa ahli ilmu politik, semua bangsa didunia akan menuju kearah pembentukan sistem dua partai ini. Salah satu alasannya adalah karena masyarakat sudah demikian modern, rasional, maka mereka akan sampai kekesimpulan bahwa esensi memilih dalam pemilu adalah minta persetujuan, suka atau tidak suka. Memilih si A atau bukan si A. Orang pun akan meletakkan partai pada posisi ada yang memerintah dan ada yang tidak, yang tugasnya mengontrol partai yang memerintah.

### **Realita Kehidupan Partai di Indonesia**

Dari alat analisa yang dipaparkan diatas, marilah kita melihat realita kehidupan partai politik di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat dari sudut pluralitasnya, bangsa kita memiliki pondasi yang sangat ideal bagi kehidupan partai politik. Namun bila kita melihat dari sudut norma-norma yang ada, utamanya norma tentang kekuasaan yang merupakan *sentrum* dari politik, pondasi itu menjadi tidak berarti. Kita akui kebhineka-an kita. Tapi pada saat yang sama kita berfikir tentang sifat kekuasaan yang *sentrifugal*. Dua hal yang tidak sejalan inilah yang melahirkan berbagai kesulitan dalam perjalanan hidup partai-partai politik di Indonesia.

Partai politik merupakan kenyataan sejarah yang tampaknya tidak dikehendaki di Indonesia. Setidaknya partai merupakan dampak modernisasi yang terpaksa kita terima. Kalau kita perhatikan sejarah kepartaian dinegara kita, partai dan ide perwakilan politik sepertinya ide asing yang mau tidak mau harus kita terima. Kita tidak memikirkan kebutuhan akan partai politik, sampai pemerintah Belanda membuat UU Desentralisasi bagi Hindia Belanda pada tahun 1898. Konsekuensi dari UU itu

adalah keharusan membentuk Dewan Rakyat (*Volksraad*) pada tahun 1903. Menarik untuk disimak, bahwa *Volksraad* dibentuk lebih dahulu, baru kemudian orang berfikir akan perlunya partai politik untuk mengisi lembaga itu secara demokratis. Parpol mulai bermunculan, itupun sebagian besar atas inisiatif anggota-anggota *Volksraad*.<sup>16</sup>

Ada dua catatan penting dari fakta diatas yang selanjutnya mempengaruhi praktek kenegaraan di Indonesia. Pertama, keanggotaan *Volksraad* ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Cara penunjukkan keanggotaan parlemen ini ternyata masih diikuti hingga sekarang. Kedua, partai dimunculkan dari dalam parlemen. Partai politik akan berfungsi sebagai *artikulator* dan *agregator* kepentingan massa, bila inisiatif pembentukannya datang dari rakyat, dari luar parlemen. Bila datang dari elit, dari dalam parlemen, maka partai politik akan berubah menjadi alat mobilisasi massa.

Dua catatan awal tersebut penting dan segera menunjukkan wujudnya. Setelah *Volksraad* dibentuk, partai-partai politik bermunculan di Indonesia. Muncul dan berkembang biaknya partai politik ini segera hilang tatkala pemerintah penjajah Jepang melarang mereka beroperasi. Partai politik dilarang berfungsi, diganti dengan kelompok-kelompok asosiasional yang digunakan sebagai alat untuk memobilisir dukungan rakyat Indonesia memenangkan perang Asia Timur Raya. Kebutuhan ini yang melahirkan fenomena kekuatan politik memiliki kekuatan militer, seperti Hizbullah dan Sabillah yang dimiliki MASYUMI, ataupun Pesindo yang dimiliki PSI.

Partai kembali muncul setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kemunculannya kembali itupun distimulir oleh pemerintah melalui Maklumat 3 November 1945. Maklumat ini dibuat menyusul tekad politik pemerintah Indonesia yang dicetuskan pada tgl. 5 Oktober 1945, untuk segera mengadakan pemilihan umum. Setelah Maklumat 3 November 1945 diumumkan, partai-partai politik di Indonesia tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan. Orang mulai sadar akan manfaat partai politik yang bisa dengan cepat merubah status sosial dan status ekonomi mereka. Partai politik segera dinilai sebagai jalan paling jitu untuk melakukan *mobilitas vertikal*, yang selama ini tidak terbayangkan. Orang kebanyakan yang selama ini sulit berkomunikasi dengan kaum ningrat, tiba-tiba mendapat jalan untuk duduk sejajar dengan mereka. Histeria *mobilitas vertikal* inilah yang melahirkan demikian banyak kontestan (partai politik maupun perorangan) dalam Pemilu 1955 hingga sekarang.

Hasil pemilu itu sendiri sudah kita ketahui. Tidak ada satupun partai politik yang mendapat suara mayoritas yang dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang kokoh. Konsekuensinya pemerintahan harus dibentuk dengan cara koalisi beberapa partai. Mungkin karena belum mapannya integrasi nasional Indonesia, serta fakta bahwa empat kekuatan politik terbesar hasil pemilu 1955 memiliki kekuatan suara yang relatif berimbang, maka polarisasi politik dalam masyarakat Indonesia masih sangat tajam.<sup>17</sup> Akibatnya partai-partai kecil yang dalam keadaan normal tidak terlalu berharga, menjadi sangat berharga terutama untuk diajak bergabung meningkatkan suara mayoritas yang dibutuhkan. Fenomena munculnya kekuatan politik minoritas yang mayoritas mulai terdeteksi saat itu.

Bersamaan dengan itu gerakan-gerakan separatis masih marak. Bahkan dua yang terbesar, PRRI dan PERMESTA, membawa petaka bagi kehidupan MASYUMI dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Kedua partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tgl. 17 Agustus 1960. Kekacauan politik yang muncul setelah pemilu 1955, telah

<sup>16</sup>Memang ada gerakan-gerakan sosial dikalangan bangsa Indonesia yang sudah ada, seperti Boedi Oetomo. Namun aktivitas mereka tidak langsung berhubungan dengan dunia politik. Atas dasar inilah saya menilai bahwa awal kehidupan partai politik di Indonesia dimulai ketika *Volksraad* sudah terbentuk.

<sup>17</sup>Suara empat besar pemenang Pemilu 1955 adalah PNI (22.3%), MASYUMI (20.9%), NU (18.4%), dan PKI (16.4%).

memaksa pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan negara Indonesia. Tahun 1957 diumumkan keadaan darurat perang, yang kemudian diikuti dengan diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta Penpres no. 7/1959. Pengumuman keadaan darurat perang secara efektif telah menarik seluruh kekuasaan politik yang terdistribusi melalui pemilu 1955, kembali memusat ditangan pemerintah. Setelah itu melalui Dekrit Presiden, dasar penyelenggaraan kehidupan politik di Indonesia dirubah, dari apa yang disebut Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Atas dasar inilah kemudian muncul Penpres no. 7/1959 tentang perlunya melakukan penyederhanaan partai di Indonesia.

Wujud dari penyederhanaan partai itu adalah Penpres. no. 13/1960, dimana pemerintah hanya mengakui adanya 10 partai politik di Indonesia.<sup>18</sup> Seluruh partai ini diwajibkan bergabung kedalam Front Nasional. Kemudian melalui Penpres. no. 193/1960, golongan fungsional yang tidak tergabung kedalam salah satu partai, boleh ikut kedalam Front Nasional. Konfigurasi kepartaian tersebut tidak bertahan lama. Konflik antar partai yang makin menajam, meledak pada tgl. 30 September 1965 melalui kudeta gagal oleh G-30-S/PKI. Ini memberi kesempatan kepada pemerintah untuk kembali menertibkan partai politik. Lewat tap. XXII/MPRS/1966, pemerintah ditugasi untuk melakukan penyederhaan partai. Namun pada saat yang sama tuntutan penyelenggaraan pemilu juga tidak bisa diabaikan. Maka sejarah mencatat terjadinya tarik-menarik antara keinginan partai politik untuk segera melakukan pemilu, dengan keinginan pemerintah untuk melakukan penyederhanaan kepartaian terlebih dahulu.

Saat itu memang ada dua pemikiran. Lakukan restrukturisasi politik terlebih dahulu, baru mengadakan pemilu. Ataukah mengadakan pemilu yang hasilnya dijadikan landasan bagi restrukturisasi politik. Partai politik menghendaki pilihan terakhir, dengan asumsi bahwa militer sebagai pemegang kekuatan politik riil saat itu belum siap dan belum berpengalaman dalam pemilu. Dihubunhkan dengan masih kuatnya ikatan primordialisme saat itu, maka pilihan partai politik ini sangat rasional. Diatas kertas mereka dapat kembali merebut kekuasaan yang ditarik sejak tahun 1957. Tetapi dilain fihak langkah ini tidak disertai dengan perhitungan yang matang, bahwa saat itu kekuatan riil ada ditangan militer, dan melalui struktur organisasi yang dimiliki militer mampu memobilisir dukungan dalam waktu singkat.

Tuntutan yang sangat keras dari partai politik inilah yang sedikit banyak mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi politik dengan sedikit banyak menggunakan cara-cara paksaan. Upaya memotong dukungan terhadap PNI melalui konsep "Monoloyalitas," ataupun melemahkan dukungan terhadap NU melalui konsep "Massa Mengambang," merupakan contoh kongkrit dari cara-cara dimaksud. Akibatnya cukup fatal. Bila pada awalnya (1945 - 1957) partai politik menjadi variabel penentu bagi dinamika sosial, maka sejak kelahiran Orde Baru partai politik menjadi variabel yang ditentukan oleh dinamika sosial.

Posisi partai yang makin terjepit dalam kancah politik, nampak dari langkah-langkah kongkrit pemerintah dalam melaksanakan penyederhanaan kehidupan partai. Sekalipun langkah-langkah itu langsung berhubungan dengan kehidupan kepartaian di Indonesia, namun pada kenyataannya juga berdampak terhadap kehidupan politik secara keseluruhan. Langkah-langkah penyederhanaan kepartaian di Indonesia dapat dikemas kedalam tiga fase. Fase pertama, 1968 s/d 1985, dilakukan peleburan pada tingkat struktur dan depolitisasi massa pada tingkat individual. Pada fase ini upaya kongkrit mengurangi jumlah partai yang ada dilakukan, sekaligus mengisolir massa dari

---

<sup>18</sup>Kesepuluh partai itu adalah: PNI, NU, PKI, Parkindo, Partai Katholik, Partindo, IPKI, Murba, PSII, dan PERTI.

keterikatan emosionalnya dengan partai politik. Praktis mulai fase ini partai kehilangan garis pendukung setia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya.

Fase kedua, 1985 s/d 2009, merupakan fase penataan kembali (restrukturisasi) partai-partai yang ada, sekaligus mulai disiapkan peleburan ideologi. Setelah 3 kekuatan politik ditentukan, peran dan fungsi mereka mulai ditata sesuai dengan format kepolitikan Orde Baru dan kebutuhan rejim pada legitimasi politik. Pada fase ini, mulai tampak indikasi bahwa sistem kepartaian yang dikehendaki adalah *hegemonic party*. Golkar berada dipusat kekuasaan, sementara PPP dan PDI berada dipinggirannya.

Fase ketiga, 2009 sampai saat ini, merupakan fase pemantapan ideologi. Berdasarkan UU no. 3/1985 dan UU no. 8/1985, tidak ada lagi kekuatan politik di Indonesia yang tidak mendasarkan diri pada ideologi tunggal Pancasila. Maksud dari langkah ini adalah agar kekuatan politik yang ada lebih mencurahkan perhatian pada operasionalisasi tujuan-tujuan pembangunan nasional. Namun pada saat yang sama, langkah ini menyulitkan partai untuk menampilkan jati dirinya. Hasil dari adanya manuver politik yang dilakukan tersebut adalah terjadinya perubahan posisi partai, dari patron terhadap pemerintah menjadi klien pemerintah. Bukannya partai menentukan komposisi aparat pemerintah, namun aparat pemerintah yang menentukan komposisi (pengurus) partai.

Konsekuensi logis dari perubahan ini adalah terjadinya perubahan pada sistem kepartaian yang berlaku. Dalam konteks perkembangan linear yang dikemukakan Sartori, saat ini kita sudah bergeser dari bentuk kepartaian yang dominan menuju ke bentuk hegemonik. Bahkan dengan kuatnya intervensi pemerintah, serta masih sangat tergantungnya partai politik kepada pemerintah, indikasi akan bergesernya bentuk hegemonik kearah *single party* makin terasa. Apalagi kita sudah secara tegas menolak sistem dua partai yang pernah ditawarkan diawal pembentukan Orde Baru. Padahal kalau mengikuti alur logika perkembangan linear, sistem dua partai adalah bentuk alternatif yang dapat menjamin mekanisme politik tetap bergerak diatas prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis.

### **Masalah Kontemporer**

Sebelum kita urutkan masalah-masalah kontemporer diseperti kehidupan kepartaian di Indonesia, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu empat faktor yang secara konsisten mempengaruhi dinamika kehidupan partai politik di Indonesia. *Faktor pertama* adalah keberadaan partai politik di Indonesia tidak pernah lepas dari intervensi pemerintah. *Faktor kedua* adalah partai politik di Indonesia lebih banyak memainkan peran sebagai alat mobilisasi massa daripada sebagai artikulator dan agregator kepentingan massa. *Faktor ketiga* adalah sejarah membuktikan bahwa partai memerlukan kehadiran kelompok penekan (*pressure group*) untuk memelihara dukungan rakyat. Dan *faktor keempat* adalah partai politik di Indonesia hidup diantara tarik menarik norma budaya politik yang *sentrifugal* dan kebutuhan distribusi kekuasaan yang bersifat *sentripetal* dalam norma kehidupan yang demokratis.

Dari keempat faktor ini, dapat dikemukakan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia. *Pertama*, masalah kemandirian partai. Kalau pada awalnya masalah ini diabaikan, maka sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari *top-down* ke *bottom-up*, partai tidak boleh lagi terus menerus menyusui ke pemerintah. Perubahan paradigma itu menghendaki agar partai berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Demikian pula partai dikehendaki berperan aktif mengontrol pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Tuntutan seperti ini tidak akan tercapai kalau partai tetap tergantung kepada pemerintah. Baik dalam hal biaya, informasi, dan sebagainya.

*Kedua*, ruang gerak yang memadai. Berdasarkan pasal 3 (a) UU no. 3/1985, partai dikehendaki memberi masukan personal maupun materi bahasan kepada sistem politik. Namun ketentuan pada pasal 5 (b) dan pasal 9 UU no. 3/1975 jo. UU no. 3/1985, partai tidak dibenarkan memiliki Ormas. Disini terdapat kontradiksi yang menyulitkan partai politik. Disatu sisi dinyatakan partai politik di Indonesia harus berbentuk partai kader, di pihak lain tidak diperkenankan memiliki Ormas. Mustahil partai dapat berbentuk partai kader tanpa memiliki Ormas, sebab disanalah bibit-bibit elit partai disemaikan.

Sempitnya ruang gerak juga disebabkan oleh masih berlakunya empat larangan politik.<sup>19</sup> Terhadap larangan pertama dan kedua, tampaknya sangat logis dan tidak perlu dipersoalkan. Kita tidak akan pernah maju kalau terus menerus berdebat soal dasar negara. Demikian pula tindakan mengintimidasi lawan politik, sejatinya tidak sesuai dengan azas gotong-royong dan kekeluargaan bangsa Indonesia. Namun larangan ketiga dan keempat benar-benar menyempitkan ruang gerak partai. Kalau partai dituntut untuk menyusun program, maka larangan ketiga dan keempat harus dicabut. Sebab proposal program apapun yang dibuat oleh partai, sedikit banyak akan mengkritik kebijakan yang selama ini diambil, sebagai konsekuensi selama ini menempatkan pemerintah sebagai ujung tombak modernisasi.

Hal lain yang menyempitkan ruang gerak partai adalah, dalam konteks terbentuknya *hegemonic party* yang diramu dengan mekanisme musyawarah-mufakat dalam pengambilan keputusan, sama sekali tidak memungkinkan PPP maupun PDI untuk memosisikan diri sebagai alternatif bagi program-program yang diajukan Golkar. Dalam posisi hegemonik Golkar mengambil inisiatif. Melalui mekanisme musyawarah-mufakat, PPP dan PDI secara moral telah diikat dengan inisiatif yang diambil.

*Ketiga*, posisi partai bertambah marginal ketika seluruh kekacauan politik yang terjadi pada tahun 1950-an ditimpakan sebagai kesalahan partai politik. Dosa tak berampun ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Mereka melihat bagaimana tawanan politik yang berasal dari aktivis partai diperlakukan. Mereka selalu dijejali dengan slogan bahwa hasil pemilu harus menjamin kepemimpinan tetap ditangan Orde Baru, yang dalam hal ini harus dibaca memenangkan Golkar. Slogan semacam ini secara implisit mendiskreditkan partai politik sebagai kekuatan Orde Lama. Padahal fakta menunjukkan bahwa mereka dibentuk oleh Orde Baru. Perjuangan untuk menghapus gambaran (*image*) negatif ini tampaknya masih memerlukan waktu yang sangat panjang.

*Keempat*, kemerosotan etika politik. Partai dikehendaki melahirkan negarawan yang handal untuk memimpin bangsa ini. Namun dengan segala kendala yang ada diatas, partai lebih banyak melahirkan politisi. Dalam situasi krisis, seperti masa transisi yang saat ini kita hadapi, negarawan akan merangkul semua orang-orang yang bertentangan demi menjaga pencapaian tujuan nasional. Sebaliknya, politisi akan membentuk kelompok dan memperjelas garis pemisah antara *in-group* dan *outer-group*, yang sangat potensial mengerosi nilai-nilai etika berpolitik yang kita miliki.

---

<sup>19</sup>Keempat larangan itu adalah:

1. Dilarang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Dilarang mengintimidasi lawan-lawan politik.
3. Dilarang mengkritik kebijaksanaan pemerintah.
4. Dilarang menjatuhkan kewibawaan aparat pemerintah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari manuver politik yang dilakukan pada tiap fase adalah terjadinya perubahan posisi partai, dari patron terhadap pemerintah menjadi klien pemerintah. Bukannya partai menentukan komposisi aparat pemerintah, namun aparat pemerintah yang menentukan komposisi (pengurus) partai. Konsekuensi logis dari perubahan ini adalah terjadinya perubahan pada sistem kepartaian yang berlaku.

Dalam konteks perkembangan linear yang dikemukakan Sartori, saat ini kita sudah bergeser dari bentuk kepartaian yang dominan menuju ke bentuk hegemonik. Bahkan dengan kuatnya intervensi pemerintah, serta masih sangat tergantungnya partai politik kepada pemerintah, indikasi akan bergesernya bentuk hegemonik ke arah single party makin terasa. Apalagi kita sudah secara tegas menolak sistem dua partai yang pernah ditawarkan di awal pembentukan Orde Baru. Padahal kalau mengikuti alur logika perkembangan linear, sistem dua partai adalah bentuk alternatif yang dapat menjamin mekanisme politik tetap bergerak di atas prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis.

Perubahan-perubahan politik di Indonesia semakin hari semakin tidak dihasilkan oleh struktur dan mekanisme yang baku. Terlalu banyak perubahan politik di Indonesia yang terjadi pada tataran hubungan personal. Padahal akibat dari perubahan itu menyangkut nasib struktur yang ada. Posisi partai yang makin terjepit dalam kancah politik, nampak dari langkah-langkah kongkrit pemerintah dalam melaksanakan penyederhanaan kehidupan partai. Sekalipun langkah-langkah itu langsung berhubungan dengan kehidupan kepartaian di Indonesia, namun pada kenyataannya juga berdampak terhadap kehidupan politik secara keseluruhan.

### **Saran**

Dalam menganalisa dinamika kehidupan partai politik di Indonesia, tampaknya kita harus memulai dari pendekatan tingkah laku (*behavioralism*) dan berupaya mengkaitkannya dengan struktur yang berlaku. Bila kita lakukan kebalikannya, maka besar kemungkinan kesimpulan-kesimpulan yang diambil lebih menyesatkan dibandingkan dengan cara pendekatan pertama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Castles, Francis G.,(1967) *Pressure Groups and Political Culture*, Routledge and Kegan Paul London, UK.
- Crespi, Irving, (1988) *Public Opinion, Polls, and Democracy*, Westview Press p. 10. Boulder, CO.
- Epstein, Leon D. (1982) *Political Parties in Western Democracies*, pp. 77-80; Transaction Books New Jersey.
- Hines, Samuel M., Jr.(1982), "Is Synthesis Philosophically Possible? The Paradigm Problem in the Philosophy of Social Science," in William T. Bluhm (ed.), *The Paradigm Problem in Political Science*, p. 26-27. Carolina Academic Press, Durham, North Carolina:

- Imawan, Riswandha, (1989). *The Evolution of Political Party Systems in Indonesia*, a dissertation, p. 14-16. DeKalb, IL.: Northern Illinois University.
- Ladd, Everett Carl Jr., (1986). *Ideology in America: Change and Response in a City, a Suburb, and a Small Town*, University Press of America, Lanham, MD
- Lane, Robert E. (1962). *Political Ideology: Why the American Common Man Believes What He Does*,.: Free Press, New York, NY
- Macridis, Roy C. (1983) *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes*, Little Brown, 2nd. edition, Boston, MA.
- Mariun, (1979). *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, (diktat kuliah), Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, (1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Panebianco, Angelo, (1988). *Political Parties: Organization and Power*,.: Cambridge University Press, Cambridge, NY.
- Sartori, Giovanni, (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, NY.